

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap informasi dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari *good governance* untuk mewujudkan pelayanan berkualitas dan kesejahteraan masyarakat di Nagari Tanjung Bonai Aur masih belum terealisasi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya peran pemerintah selaku penyelenggara yang mementingkan dan hanya memperjuangkan keinginan dengan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, meskipun sudah mengetahui adanya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana balai adat Nagari Tanjung Bonai Aur.

Selain itu bentuk transparansi yang dilakukan pemerintahan nagari pada pelaksanaan pembangunan balai adat masih kurang serta belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan perbaikan balai adat tersebut. Walaupun keterlibatan masyarakat dalam pembangunan balai adat ini cukup optimal, namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak diberikan keterbukaan informasi mengenai kemajuan dari pelaksanaan pembangunan balai adat tersebut, sehingga menimbulkan penyelewengan pada jajaran KAN di Nagari Tanjung Bonai Aur.

Selain itu pemerintah Nagari Tanjung Bonai Aur maupun KAN belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik

serta belum mampu memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Nagari Tanjung Bonai Aur mengenai implementasi Tansparansi dan Akuntabilitas dalam perbaikan balai adat masih mengalami kekurangan, dimana belum optimalnya prinsip transparansi dan prinsip Akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan masih kurang optimalnya penyajian informasi dan tidak adanya laporan secara tertulis bagi panitia pembangunan perbaikan balai adat di Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Melihat kondisi yang masih kurang tersebut maka penliti ingin memberikan masukan bagi Pemerintahan Nagari Tanjung Bonai aur:

1. Pemerintahan Nagari selaku memutuskan keputusan, hendaknya menyeleksi panitia pelaksana sesuai dengan keahlian dan berani untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan
2. Pengoptimalan papan informasi, guna menyampaikan informasi yang jelas bagi masyarakat. Sehingga menciptakan *Clean Governance* di Nagari Tanjung Bonai Aur.
3. Kotak saran atau kotak pengaduan harus di aktifkan kembali, guna menampung kritikan atau masukan dari masyarakat untuk Pemerintahan Nagari demi kelancaran roda Pemerintahan.
4. Setiap kegiatan yang dilakukan diharuskan untuk membuat laporan pertanggung jawaban bukan sekedar pertanggung jawaban secara

lisan, demi membentuk karakter sumber daya masyarakat yang profesional.

